

# Peran Organisasi Perempuan dalam Ruang Perkotaan

Bagas Dwipantara Putra<sup>1,2</sup> dan Hani Yulindrasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Visiting Research Fellow, School of Global, Urban and Social Studies  
RMIT University, Melbourne, Australia

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan,  
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia  
*e-mail*: bagasputra@itb.ac.id

*Abstrak*—Saat ini keberadaan ruang publik perkotaan di Indonesia mengalami tekanan pembangunan yang sedemikian pesat, hal ini berdampak terhadap kuantitas ruang publik yang terus mengalami penyusutan baik dari segi jumlah maupun luasan. Penciptaan ruang publik di permukiman padat penduduk seperti kampung kota dapat dilakukan melalui dukungan dan peran dari organisasi komunitas yang berpihak pada keadilan dan inklusivitas ruang kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mencoba mengeksplorasi peran kepemimpinan perempuan dalam penciptaan ruang komunal di kampung kota di Jakarta Selatan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pemimpin perempuan menaruh perhatian besar pada isu-isu terkait kesehatan, lingkungan, dan juga akses ruang publik bagi warga kampung kota yang termarginalkan. Selain itu dengan didukung keberadaan komunitas dan kolegalitas warga yang solid, maka kehadiran ruang publik demi peningkatan kualitas lingkungan binaan yang mereka tinggali dapat tercapai.

*Kata Kunci*—Kampung Kota, Kepemimpinan, Perempuan, Ruang Komunal.

## I. PENDAHULUAN

PERMASALAHAN perkotaan di Indonesia sangatlah kompleks dan beragam. Salah satunya adalah keberadaan ruang publik perkotaan yang saat ini mengalami tekanan pembangunan yang sedemikian pesat, dan berdampak terhadap kuantitas ruang publik yang terus mengalami penyusutan baik dari segi jumlah maupun luasan. Berkurangnya ruang publik, termasuk didalamnya ruang terbuka hijau turut berimplikasi terhadap kehidupan warga kota, baik itu dari segi ekonomi, sosial-budaya maupun kesehatan [1]-[3]. Karena itulah ruang publik memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan warga kota. Dikarenakan pentingnya peranan yang dimainkan oleh ruang publik perkotaan, maka sudah seyogyanya keberadaan ruang tersebut dapat diakses oleh seluruh warga kota terlepas dari latar belakang yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya ruang publik perkotaan di Indonesia belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan warga masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah (MBR) yang mendiami kawasan kampung kota [4]. Akses ruang publik bagi warga marginal masih jauh dari ideal, dimana kawasan tersebut tidak terlayani dengan baik sehingga warga masyarakat tidak memiliki ruang komunal sebagai

bentuk perwujudan wadah sosial.

Sebagai bentuk jawaban akan terbatasnya akses ruang publik di kampung kota, warga yang menghuni kawasan tersebut mulai mengadakan perlawanan dengan menghadirkan ruang publik secara swadaya. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya komunitas memainkan peran yang sangat penting dalam penciptaan ruang publik di kawasan marginal [5], [6]. Produksi ruang publik sebagai ruang komunal pada komunitas marginal mengindikasikan modal sosial yang tinggi antar warga, dimana dukungan dan peran aktif masyarakat menjamin keberhasilan kegiatan tersebut.

Kolaborasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik antara para pemimpin masyarakat dan warga juga turut membantu dalam produksi ruang publik di kawasan marginal, seperti pada kampung kota. Pada artikel ini, peran pemimpin perempuan dalam menggerakkan dan memberdayakan komunitas dalam produksi ruang publik akan dibahas lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Vandana Shiva [7], [8] terkait dengan peran signifikan perempuan dalam hal produksi dan pemeliharaan lingkungan binaan.

## II. PEREMPUAN DAN RUANG KOTA

Dalam teori perkotaan kritis pemahaman terhadap gender dan kaitannya dengan proses penciptaan ruang kota belum menjadi perhatian utama bagi para *scholars* perkotaan. Umumnya representasi gender masih didominasi oleh *scholars* laki-laki, paruh baya dan berkulit putih, sedangkan *scholars* yang menyuarakan isu-isu gender minoritas (perempuan, LGBTIQ) seringkali tidak terdengar [9]-[15]. Di Indonesia pun para ahli perkotaan masih didominasi oleh laki-laki. Terlihat dari dominasi laki-laki dalam struktur organisasi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI). Dari 16 orang yang tercantum dalam Dewan Penasihat IAPI, hanya ada 1 orang perempuan [16]. Ahli tata kota yang menulis buku yang banyak dirujuk di Indonesia pun adalah laki-laki, seperti Hadi Sabari Yunus, Rinaldi Mirsa, dan Ridwan Sutriadi. Dominasi oleh laki-laki ini melahirkan dominasi teori-teori perkotaan dengan perspektif netral gender yang cenderung maskulin sehingga isu-isu yang terkait dengan keberpihakan pada gender minoritas di ruang kota seringkali diabaikan. Contoh dari penataan ruang kota yang maskulin dan tidak ramah perempuan adalah lebar

trottoar yang sempit. Trottoar yang sempit sangat tidak nyaman digunakan oleh perempuan yang seringkali harus berjalan bersama dengan anaknya yang masih balita. Selain trottoar yang sempit, pembangunan toilet di pusat-pusat perbelanjaan yang menggunakan perspektif bias gender seringkali membuat antrian di toilet perempuan jauh lebih panjang dari antrian di toilet laki-laki. Jumlah bilik toilet untuk laki-laki dan perempuan seringkali dibuat sama dan di toilet laki-laki biasanya ditambah dengan urinoir yang bisa menambah kapasitas ruang toilet. Sering dilupakan bahwa waktu yang dibutuhkan perempuan di toilet 22% lebih lama dari laki-laki [17], [18] dan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan biasanya lebih banyak perempuan [19], [20], juga toilet perempuan seringkali digunakan oleh anak-anak karena anak-anak cenderung ditemani ibunya saat ke toilet.

Ruang publik perkotaan merupakan salah satu elemen pembentuk dan bagian tidak terpisahkan dari ruang kota. Ruang publik dapat didefinisikan berdasarkan karakteristiknya, yaitu; (i) ruang publik sebagai wadah interaksi sosial bagi pembentukan karakter dan dinamika sosial warga, (ii) ruang publik harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat kota tanpa adanya pengecualian (*accessible for all*), (iii) bersifat universal dan inklusif, dimana seluruh lapisan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kelas sosial dapat mempergunakan fasilitas tersebut, dan (iv) harus bersifat publik (*publicness*) dengan tidak adanya sekat/pembatas di dalam area tersebut [21].

Produksi ruang publik dalam konteks kawasan permukiman padat penduduk, seperti pada kasus kampung kota tentu akan berbeda dengan pengembangan ruang publik pada bagian wilayah kota lainnya. Ruang publik, sebagai pengejawantahan bentuk ruang sosial diproduksi dari hasil interaksi komunitas yang turut membantu dalam menciptakan keharmonisan antar warga [22]. Menurut William H. Whyte fenomena ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya ruang publik merupakan ruang yang ideal bagi interaksi sosial dan dalam berkegiatan sehari-hari [23].

Kerangka kerja penciptaan kota yang inklusif berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dapat dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya keberadaan ruang publik kota dapat diakses oleh seluruh warga kota tanpa adanya pengecualian [24]. Arif Maftuhin berpendapat bahwa sebuah kota inklusif, harus memikirkan upaya pemenuhan hak atas masyarakat marjinal serta adanya budaya inklusivitas yang menjiwai kehidupan warga kota [25]. Dalam kasus akses terhadap ruang publik perkotaan di Indonesia terutama bagi masyarakat marjinal, dapat dikatakan bahwa inklusivitas belum terjadi secara maksimal.

Pembangunan kota di Indonesia belum melibatkan berbagai pihak yang akan memanfaatkan ruang di dalamnya. Misalnya saja pada aspek gender, kebutuhan perempuan di ruang kota banyak terabaikan. Hasil survey Thomas Reuters Foundation tahun 2017 menempatkan Jakarta di posisi ke-9 dunia untuk kota paling bahaya untuk perempuan karena maraknya pelecehan seksual di ruang publik [26].

Brenda Parker melihat perencanaan kota yang inklusif dan responsif gender perlu melihat unsur interseksionalitas berbagai identitas sosial sehingga kota dapat menjadi ruang perwujudan keadilan sosial. Akses dan kontrol perempuan terhadap ruang perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh gendernya saja tapi juga oleh identitas sosial lain yang dimilikinya [27]. Untuk itu dalam tulisan ini peran

perempuan yang dianalisis dikhususkan pada kelompok perempuan masyarakat berpenghasilan rendah.

Peran perempuan dalam perencanaan kota sebetulnya cukup signifikan. Kacamata feminis dalam kajian-kajian perencanaan kota di negara-negara belahan utara juga sudah di mulai digunakan akhir abad ke 19 walaupun masih terbatas pada bagaimana membuat kota menjadi perluasan rumah yang dapat mengakomodasi tugas-tugas domestik yang lebih banyak dikerjakan oleh perempuan [28], [29]. Kajian gender dan perkotaan di belahan utara saat ini banyak memfokuskan pada kajian perencanaan, perumahan, dan layanan kesehatan untuk perempuan [27]. Untuk di Indonesia sendiri, gender dan perkotaan masih menjadi area yang belum banyak diteliti. Beberapa peneliti yang menulis tentang gender dan perkotaan lebih banyak membahas tentang transportasi perkotaan dan gender [30], [32], pembangunan kapasitas perempuan dalam penggunaan teknologi digital yang berhubungan dengan *smart-city* [33], pembangunan sistem sanitasi kota [34] dan sedikit sekali yang membahas kaitan antara gender dan *placemaking* [35]. Penelitian-penelitian tersebut belum melihat perempuan sebagai subjek pembangunan yang bisa berkontribusi dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Padahal perempuan memiliki peran signifikan dalam pembangunan. Misalnya saja seperti yang dikatakan Vandana Shiva [7], [8] bahwa peran perempuan sebagai pelindung alam, penyedia pangan, air, kesehatan dan keamanan sosial telah membuktikan kapasitas perempuan sebagai pembina lingkungan binaan yang handal. Namun sangat ironis, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan lingkungan binaan di banyak negara berkembang belum menunjukkan angka yang signifikan, hal ini seringkali dikaitkan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang berlaku [36], [37]. Praktek politik patriarki juga turut memperparah proses keterlibatan perempuan di banyak sendi pembangunan, hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya perempuan berada dalam posisi marginal dalam proses pembangunan perkotaan dan setara dengan kelompok marjinal perkotaan lainnya.

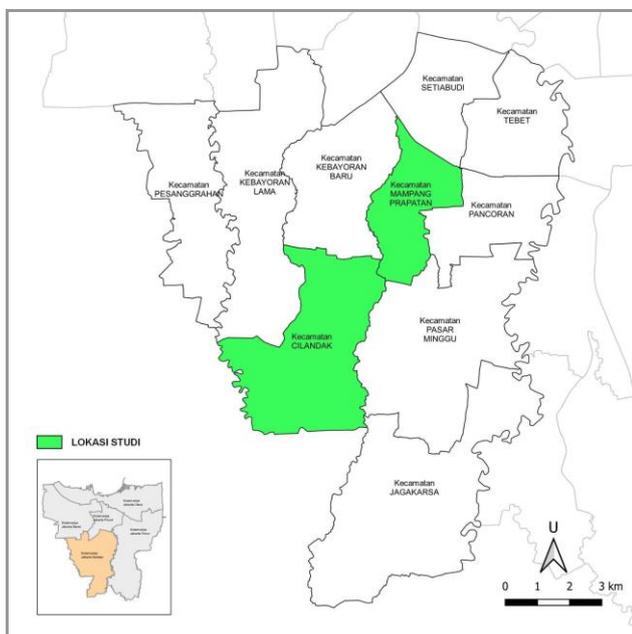
Kelompok marjinal perkotaan sebagai kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan, seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam pemenuhan hak-hak mereka [38]. Hal ini juga terlihat pada penyediaan ruang publik pada kawasan marjinal seperti di kampung-kota, dimana keterlibatan perempuan berkontribusi positif pada penciptaannya tetapi seringkali dilupakan kebutuhan gender spesifiknya. Semangat inklusivitas haruslah melandasi setiap pengembangan kawasan perkotaan, sehingga tidak ada satupun warga kota yang tertinggal dan terlupakan [39].

### III. KAMPUNG KOTA

Kampung kota sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari morfologi perkotaan di Indonesia, seringkali diasosiasikan dengan kumuh, ketidakaturan dan hunian yang bersifat informal. Namun kita seringkali melupakan, bahwa sesungguhnya permukiman ini sanggup menyediakan hunian dasar bagi banyak masyarakat miskin perkotaan yang seakan terlupakan. Selama pemerintah belum dapat menyediakan perumahan layak bagi masyarakat miskin perkotaan, salah satu langkah termudah dan tercepat adalah dengan memperbaiki kualitas lingkungan binaan dari kampung-kota, termasuk dalam hal penyediaan ruang publik [40].

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia, dihadapkan oleh berbagai permasalahan perkotaan. Dengan ketersediaan ruang publik yang sangat minimal menjadikan kota ini jauh dari kata layak dan humanis. Kota Jakarta Selatan, sebagai salah satu kota pembentuk Provinsi DKI Jakarta, tidak terlepas dari isu yang serupa dimana keberadaan ruang publik umumnya hanya tersebar di lingkungan perumahan yang terencana dengan baik [41].

Pada penelitian ini, dua kampung-kota di Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Cilandak akan dipilih menjadi kawasan studi. Komunitas Kampung-kota di Kecamatan Cilandak yang diwawancarai untuk penelitian ini terletak di RW 002, RW 003 dan RW 008. Sedangkan komunitas kampung-kota di Kecamatan Mampang Prapatan berada di RT 007, RW 008 dan RT 011 (lihat Gambar 1). Alasan pemilihan kedua kecamatan tersebut adalah karena keberadaan program penghijauan kampung yang dimotori oleh komunitas setempat.



Gambar 1. Peta Lokasi Studi

#### IV. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dapat dipergunakan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan perempuan dalam menciptakan ruang publik di permukiman padat penduduk. Keunggulan penelitian kualitatif yaitu peneliti dapat menggali lebih dalam informasi yang didapat dari narasumber, bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif [42].

Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan lokasi studi. Seperti yang diutarakan oleh Robert Yin [43], bahwa penelitian yang mengaplikasikan studi kasus dapat menjelaskan kompleksitas fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat.

Selain itu, penggunaan metodologi penelitian yang berspektif terhadap isu keberagaman gender dan seksualitas penting untuk dipergunakan dalam membahas penelitian ini. Hal ini karena perlu adanya upaya untuk memahami relasi kuasa (*power balance*) dalam pembentukan sumber-sumber pengetahuan dalam ranah keilmuan perencanaan dan perancangan kota yang berkeadilan gender [44].

Narasumber pada penelitian ini terdiri dari para pemimpin komunitas dan warga masyarakat pada dua kawasan studi. Pemimpin komunitas yang diwawancarai terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pada organisasi tingkat RT, RW, Poktan (Kelompok Tani), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu kelompok masyarakat yang ikut dalam kegiatan-kegiatan di tingkat lingkungan.

Penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang mendalam kepada para narasumber. Sedangkan untuk mendapatkan narasumber yang valid, teknik snowballing dipergunakan pada penelitian ini yang dilaksanakan pada Bulan April - Juni 2014.

#### V. ORGANISASI PEREMPUAN DAN RUANG KOMUNAL

Dalam sistem kelembagaan di kampung kota terdapat peran ganda pemimpin komunitas yang juga merupakan bagian dari anggota masyarakat, dimana kelembagaan bersifat informal dan sukarela. Sistem kelembagaan masyarakat yang kita kenal saat ini, seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan sebuah sistem yang diadaptasi dari sistem pemerintahan desa di Jepang yang dikenal dengan istilah *Tonarigumi* dan kemudian diadopsi pada saat penjajahan Jepang hingga hari ini [45]. Pada konteks kontemporer Indonesia, sistem kelembagaan ini tetap dipertahankan, dimana pemimpin RT/RW dipilih setiap tiga tahun oleh anggota masyarakat melalui pertemuan anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua RT/RW dibantu oleh anggota masyarakat lainnya, termasuk sekretaris dan bendahara.

*“Sama seperti organisasi lainnya, ada ketua, sekretaris, dan bendahara...[L2]”*

Ketua RT/RW memiliki hak prerogatif untuk menambah jabatan baru di lingkungan RT/RW di luar tiga jabatan utama; posisinya disesuaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Personil untuk mengisi posisi tersebut selalu berasal dari lingkungan sekitar. Salah satu contohnya adalah kehadiran kader lingkungan di badan tata kelola RT/RW.

Sebagai ketua RT/RW, mereka memiliki peran yang signifikan. Tugas utama mereka yaitu memastikan bahwa setiap orang yang mendiami kawasan yang mereka pimpin, tercatat dan terdata dengan baik. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sekaligus menjadi wakil dari masyarakat; dan berada di garis depan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Mereka juga diharapkan menjadi panutan yang dapat dicontoh oleh masyarakat.

*“Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi mereka mengikuti kita, dan bahkan setelah diberi contoh, mereka tetap harus diawasi dan dikontrol...[L2]”*

Selain menjalankan peran dan tugasnya, seorang ketua RT/RW dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Diharapkan dengan

dua kemampuan ini maka ketua RT/RW dapat berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Contoh dari penggunaan kedua keahlian tersebut, dapat dilihat di Mampang Prapatan dimana ketua RT merupakan pribadi yang simpatik dan mudah didekati, termasuk terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan.

*“...Ketua RT dia merupakan pribadi yang bersahabat dengan siapa saja, dan dia juga pandai bergaul dengan semua kalangan masyarakat. Kadang ada kalanya komunitas itu sulit untuk ditangani dan dengan pendekatan yang dia pgunakan, komunitas akan menjadi lembut hatinya...karena dia bisa mendekati anggota komunitas yang tidak setuju dengannya...[M5]”*

Sebagai pemimpin dan bagian dari masyarakat, ketua RT/RW memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap lingkungannya. Dalam budaya Indonesia, ketua RT/RW dianggap sebagai orang yang dituakan atau dihormati di masyarakat.

*“Tugas dan fungsi Ketua RT itu seperti orang tua bagi masyarakat, baik itu membina atau melayani masyarakat...[M5]”*

Kelompok berpengaruh lainnya dalam proses penciptaan ruang terbuka hijau di kampung kota adalah organisasi perempuan yang berada di bawah naungan dua buah organisasi, yaitu: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelompok Wanita Tani (KWT). PKK adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang fokus kepada isu-isu perempuan, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, diantaranya yaitu: pemberdayaan ekonomi keluarga, kesadaran dalam menjaga kesehatan, program pelatihan, dan inisiatif pemeliharaan lingkungan binaan.

Dari beberapa program kerja PKK, terdapat satu program yang memiliki andil dalam menjaga dan memelihara keharmonisan lingkungan, yaitu program yang berkaitan dengan inisiatif ketahanan pangan. Hal ini terlihat terutama pada saat kerja bakti, dimana masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan kemudian dilanjutkan dengan memelihara kebun masyarakat yang berupa TOGA (Tanaman Obat Keluarga) atau pertanian perkotaan, dengan tujuan untuk menciptakan ketahanan masyarakat melalui ketahanan pangan.

*“Asosiasi kelompok perempuanlah yang memulai program ketahanan pangan keluarga...[L7]”*



Gambar 2. Kegiatan Organisasi berbasis Perempuan di Kampung Kota

Selain PKK, organisasi perempuan lain yang juga memiliki peran penting dalam inisiatif hijau di kampung kota adalah KWT. KWT merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pertanian, agar tercapai produktivitas pertanian yang maksimal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. KWT mendapat dukungan dari pemerintah melalui berbagai cara, salah satunya melalui program pendampingan pertanian. Diharapkan hasil produksi pertanian tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan anggotanya.

*“Di kelompok tani saya bertindak sebagai ketua kelompok, awalnya saya diminta oleh pihak kelurahan (kecamatan) untuk mengikuti kursus singkat catering, dan dalam pertemuan itu ada yang mengusulkan untuk membentuk kelompok tani. mengelompokkan produk kami seperti kentang kering, jadi setelah itu kami mengadakan pertemuan rutin, saat itu kami dibina oleh Pemkot Jakarta Selatan...[L4]”*

Organisasi penting lainnya adalah POKTAN dan GAPOKTAN di mana keanggotaannya terbuka untuk semua anggota masyarakat. POKTAN dan GAPOKTAN fokus pada produksi pertanian rakyat di perkotaan, dimana POKTAN menjadi garda terdepan dalam penyediaan ketahanan pangan dasar di tingkat masyarakat; sedangkan GAPOKTAN merupakan perkumpulan dari beberapa POKTAN di tingkat kecamatan. Anggota POKTAN menjawab tantangan terkait masalah ketahanan pangan pada pertemuan tahunan GAPOKTAN di mana anggota POKTAN dapat berbagi pengalaman mereka tentang musim tanam dan panen.

*“...POKTAN ada di tingkat RW, GAPOKTAN di tingkat kecamatan...lebih mudah dan teratur karena sudah ada jadwal rutin...[G11]”*

Contoh di atas menunjukkan peran aktif organisasi perempuan dalam komunitas kampung kota yang terlibat langsung dalam penyediaan ruang terbuka hijau di lingkungan mereka. Organisasi tersebut memudahkan mobilisasi kegiatan penghijauan karena dukungan struktural yang dimilikinya guna mencapai tujuan kolektif. Selain itu, kolektifitas dari kegiatan mereka memungkinkan inisiasi pelaksanaan ide/gagasan komunal yang lebih cepat.



Gambar 3. Interaksi dan Jejaring antar Organisasi berbasis Perempuan

## VI. DISKUSI

Konstruksi sosial masyarakat di kampung kota dibentuk dan dipengaruhi oleh bagaimana struktur kekuatan bermain antara aktor yang berpengaruh, sehingga berkontribusi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik dariarganya. Contoh dari studi kasus menunjukkan bagaimana konstruksi sosial diwujudkan melalui pembentukan organisasi berbasis masyarakat seperti RT/RW, PKK, KWT dan GAPOKTAN, dimana kehadirannya menciptakan sebuah struktur bermasyarakat yang terorganisir. Bukti empiris

memperlihatkan bahwa organisasi tersebut berperan sebagai agen/perantara perubahan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warganya. Lebih lanjut kehadiran organisasi berbasis masyarakat mengupayakan terciptanya inklusivitas dan kohesi sosial, dengan memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk mengambil bagian dalam inisiatif pembangunan kampung.

Keberadaan organisasi berbasis masyarakat di kampung kota memunculkan wacana komunitarianisme, hal ini dikarenakan organisasi tersebut berbasis sukarela dan bergantung pada dukungan dari masyarakat setempat. Umumnya setiap keputusan yang dibuat merupakan hasil kolektif dan dengan didasarkan atas rasa kekeluargaan yang erat. Hal ini sesuai dengan pemikiran dan gagasan Sosiolog Amerika, Amitai Etzioni tentang masyarakat Amerika, di mana ia berpendapat tentang perlunya merangkul dan memulihkan nilai-nilai komunitas yang secara perlahan tergerus oleh individualisme [46]. Sedangkan Istilah 'komunitas' yang dipergunakan dalam konteks penelitian ini mengacu pada kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan, dimana *scholars* dalam ilmu sosial berpendapat bahwa ide dan gagasan terkait dengan komunitas sangatlah cair dan masih bisa diperdebatkan [47]-[49].

Sejauh ini keberhasilan organisasi berbasis masyarakat di kampung kota turut dipengaruhi oleh pendekatan yang dipergunakan para pemimpin komunitas dalam membimbing dan mengarahkan warganya. Terdapat kesamaan struktur sosial dalam masyarakat pedesaan di Indonesia dengan masyarakat adat Australia, dimana para pemimpin komunitas memegang posisi kunci dalam kehidupan bermasyarakat [50]-[52]. Faktor penting lainnya dalam keberhasilan organisasi berbasis masyarakat adalah keterlibatan perempuan dalam setiap inisiatif pembangunan kampung, hal ini sesuai dengan pengamatan Vandana Shiva [7], [8] tentang peran perempuan sebagai penjaga alam, penyedia makanan, air, kesehatan dan jaminan sosial. Faktanya, organisasi dan kepemimpinan perempuan membantu memperkuat dan mengintensifkan inisiatif hijau di lingkungan mereka.

Konsep hidup berkomunitas di lingkungan perkotaan saat ini sudah mulai terpinggirkan, dan digantikan oleh gaya hidup yang lebih "modern". Berdasarkan studi kasus dari kota-kota besar di Amerika Utara, menunjukkan bahwa ikatan sosial yang didasarkan atas semangat komunitarianisme telah meredup dan bergeser menjadi nilai-nilai yang individualistik [46]. Sesungguhnya fenomena individualisme di perkotaan telah mengglobal dan semakin diterima secara luas oleh masyarakat urban. Hal ini turut diperparah dengan kehadiran teknologi informasi yang semakin mengurangi interaksi langsung antar warga, dimana masyarakat yang berbasis 'teknologi dan jaringan' tumbuh subur pada kota-kota global [53], [54].

Kritik terhadap organisasi berbasis masyarakat, umumnya datang dari kelompok maupun individu yang memegang teguh nilai-nilai individualisme. Christine Everingham mempertanyakan efektivitas politik komunitas sebagai sebuah perekat sosial yang efektif. Dia berpendapat bahwa komunitas seringkali dipergunakan sebagai alat politik oleh para elite penguasa, dan sekaligus sebagai sumber konflik antar politisi yang berakibat timbulnya ketidakpercayaan antara politisi dan anggota komunitas [55]. Dualisme dalam politik komunitas ini telah melahirkan sebuah alternatif pengelolaan komunitas yang progresif, berpusat pada gagasan swadaya (*self-help*) seperti pada

praktik perumahan swadaya di komunitas yang terpinggirkan [56].

Perdebatan terkait komunitas di kampung kota dan tantangan modernisasi erat kaitannya dengan gagasan dekolonialisme. Seperti masyarakat perkotaan di negara berkembang lainnya, tataran kehidupan masyarakat 'modern' di Jakarta dikonstruksikan oleh tangan-tangan kolonialisme. Secara umum cara berpikir masyarakat perkotaan masih dipengaruhi oleh bagaimana relasi kuasa diformalkan ketika masa penjajahan, dimana dominasi 'barat' masih mewarnai berbagai sektor kehidupan di masyarakat dan berada dalam posisi sentral dalam hegemoni kapitalisme modern [57]. Dalam hal produksi pengetahuan, Anibal Quijano [58] berpendapat bahwa secara global konstruksi pengetahuan yang kita pergunakan saat ini merupakan produk kolonialisme yang melihat relasi kuasa dalam hubungan "subjek-objek", dan memisahkan masyarakat berdasarkan kekayaan, ras dan budaya, dimana praktek ini telah diterima secara luas [59]. Argumen ini berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat perkotaan yang berasal dari kalangan menengah, memandang masyarakat di kampung kota sebagai berbeda, terbelakang dan membutuhkan modernisasi, dan tentunya akan menimbulkan ketegangan akibat perbedaan dari interpretasi nilai-nilai sosial yang mereka percayai sebagai benar.

Bukti empirik dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kehadiran organisasi berbasis komunitas, utamanya peran dari organisasi perempuan mampu memberikan sebuah struktur dan dukungan yang penting dalam membangun modal dan jejaring sosial di masyarakat. Menurut Amitai Etzioni [46],[60] hal ini sejalan dengan semangat komunitarianisme, yang melandasi rasa kebersamaan dan sepenanggungan antar warga yang menghuni kampung kota. Sementara itu gagasan terkait modalitas dan jejaring sosial jarang sekali dibahas dalam ranah perancangan kota, dan ramifikasi dari organisasi berbasis komunitas dalam proses *placemaking*.

Umumnya para perancang kota jarang memperhatikan aspek sosial dalam merancang sebuah lingkungan binaan dan seringkali terjebak dalam jargon-jargon estetika semata; seperti keindahan kota, peremajaan kota, peningkatan densitas kawasan, dll., yang berakibat pada pengabaian kondisi sosial masyarakat di kawasan perancangan. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Donald Appleyard [61] bahwa, "Komunitas sebagai salah satu fokus/orientasi dalam desain perkotaan kurang mendapat perhatian". Pelibatan anggota masyarakat dalam proses perancangan kota juga jarang sekali dilakukan oleh para perancang kota di negara-negara berkembang. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan sifat dari keilmuan perancangan kota yang dianggap masih "asing", baru dan belum dipahami secara luas, baik oleh praktisi maupun pengguna. Selain daripada itu perlu adanya pendekatan khusus terhadap kelompok-kelompok marginal di perkotaan, agar mereka dapat terlibat dalam proses pembangunan kota.

## VII. KESIMPULAN

Proses penciptaan ruang publik secara informal dalam konteks perkotaan di negara berkembang jarang sekali dibahas oleh para *scholars* perkotaan, walaupun sebenarnya topik ini sangatlah relevan dengan kondisi perkotaan di Indonesia yang saat ini mengalami tekanan urbanisasi sangat pesat. Bukti dari kedua studi kasus yang dipergunakan pada

penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif dari organisasi berbasis komunitas, utamanya organisasi perempuan mampu membantu dalam penciptaan ruang-ruang informal di kampung kota. Kehadiran organisasi tersebut menciptakan sebuah ekosistem sosial yang mendukung terciptanya sebuah gerakan berbasis komunitas.

Dengan hadirnya organisasi perempuan di ranah publik perkotaan, hal ini turut membantu menciptakan sebuah struktur sosial masyarakat yang inklusif dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, dan berdampak signifikan dalam proses *placemaking* di kampung kota. Kampung kota dihuni oleh warga yang berasal dari beragam etnis dan kondisi sosial ekonomi, hal ini menciptakan sebuah lingkungan yang pluralistik dan multikultural. Kehadiran organisasi berbasis masyarakat seperti RT/RW, PKK, KWT dan GAPOKTAN serta didukung oleh para pemimpin organisasi yang akomodatif dan visioner, mampu menyatukan warga kampung kota dengan beragam latar belakang tersebut. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran organisasi berbasis komunitas memberikan struktur dan dukungan yang penting dalam membangun dan memelihara modal dan jejaring sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, wacana terkait modal sosial jarang dikemukakan dalam ranah perancangan kota, terlebih gagasan tentang komunitarianisme dan dampak organisasi berbasis komunitas dalam proses *placemaking*, dimana aspek ini seringkali diabaikan oleh para perancang kota yang terjebak dalam jargon-jargon keindahan kota semata.

Produksi ruang kota melalui proses sosio-spasial pada kota-kota di negara berkembang perlu mendapat perhatian serius dari para *scholars* perkotaan, hal ini dikarenakan terbatasnya penelitian terkait hal tersebut. Salah satu contoh penting dari proses sosio-spasial di kampung kota dapat dilihat selama kerja bakti, dimana peran kepemimpinan perempuan di organisasi berbasis komunitas terlihat sangat jelas dengan kolaborasi dan jaringan sosial yang terbangun. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang dibangun dan ditanamkan oleh para pemimpin komunitas ke masyarakat, turut memberikan andil penting dalam keberhasilan kegiatan tersebut sehingga tercipta lingkungan permukiman yang layak huni. Melalui interaksi sosial yang terjadi selama kerja bakti, terbuka kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk menjalin kohesi sosial, dan kesempatan yang baik untuk mengenal lebih dekat. Hubungan antar manusia yang terjalin pada ruang informal di kampung kota, memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi dan membentuk morfologi dari kawasan tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada asisten penulis yaitu Vini Nur Alfiani, S.Pt. dan Muhammad Ihsan Yudanto, ST. atas bantuannya dalam proses editing dan penyediaan peta bagi artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Godbey, G., Graefe, A., & James, S. (1992). *The benefits of local recreation and park services, a nationwide study of the perceptions of the American public*.
- [2] Coley, R. L., Sullivan, W. C., & Kuo, F. E. (1997). Where Does Community Grow? *Environment and Behavior*, 29 (4), 468-494.
- [3] Luttik, J. (2000). The value of trees, water and open space as reflected by house prices in the Netherlands. *Landscape and Urban Planning*, 48(3-4), 161-167.
- [4] Tan, P., Wang, J., & Sia, A. (2013). Perspectives on five decades of the urban greening of Singapore. *Cities*.
- [5] Grobicki, A. M. (2001). Urban catchment management in a developing country: the Lotus River project, Cape Town, South Africa. In *Water science and technology: a journal of the International Association on Water Pollution Research* (Vol. 44, Issues 2-3, pp. 313-319).
- [6] Holmer, R. (2011). Vegetable gardens benefit the urban poor in the Philippines. *Appropriate Technology*, 38(2):49-51
- [7] Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, ecology and development*.
- [8] Shiva, V. (2005). *Earth democracy: Justice, sustainability and peace*.
- [9] Butler, J. (1990). "Gender trouble: Feminism and The Subversion of Identity". New York: Routledge.
- [10] Butler, J. (1993). *Critically Queer*. GLQ 1(1): 17-32.
- [11] Butler, J. (2004). *Undoing Gender*. New York: Routledge.
- [12] Oswin, N. (2012). The queer time of creative urbanism: Family, futurity, and global city Singapore. *Environment and Planning A*, 44(7), 1624-1640.
- [13] Oswin, N. (2014). Queer time in global city Singapore: Neoliberal futures and the 'freedom to love'. *Sexualities*, 17(4), 412-433.
- [14] Oswin, N. (2019). *Global city futures: Desire and development in Singapore* (Vol. 44). University of Georgia Press.
- [15] Oswin, N. (2020). Another geography. *Dialogues in Human Geography*.
- [16] Bagan Struktur Organisasi | IAP Indonesia, <https://iapindonesia.org/about/603ce58b5fe2566554bafaa0> Diakses pada 21 Januari 2023.
- [17] Gwynne, S. M., Hunt, A. L., Thomas, J. R., Thompson, A. J., & Séguin, L. (2019). The toilet paper: Bathroom dwell time observations at an airport. *Journal of Building Engineering*, 24, 100751.
- [18] Alyani, N., & Hidayat, E. (2022). LITERASI FASILITAS UMUM BERBASIS GENDER DI SUPERMALL UNTUK KEAMANAN PENGUNJUNG DARI BENCANA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 42-51.
- [19] Putri, F. A., & Triana, E. (2022). KARAKTERISTIK PENGUNJUNG MALL JAMBI TOWN SQUARE. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University*, 1(3), 31-32.
- [20] Bayudi, S. A., Bela, P. A., & Rahardjo, P. (2020). Evaluasi Keberhasilan Bauran Penyewa Mall Kuningan City. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(2), 2603-2616.
- [21] Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Tataloka*, 16(3), 153-167.
- [22] Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. In *Production* (Vol. 9, Issue 2).
- [23] Whyte, W. H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. In *Common Ground*.
- [24] SDGs, U. N. (2015). United Nations sustainable development goals.
- [25] Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tata Loka*, 19(2), 93-103.
- [26] Kompas.com. (2017). Ini 10 Kota di Dunia Paling Berbahaya bagi Perempuan, Adakah Jakarta? Halaman all - Kompas.com <https://internasional.kompas.com/read/2017/10/18/06291551/ini-10-kota-di-dunia-paling-berbahaya-bagi-perempuan-adakah-jakarta?page=all> Diakses pada 3 Agustus 2022.
- [27] Parker, B. (2012). Gender, cities, and planning. *The Oxford Handbook of urban planning*.
- [28] Markusen, A. (1980). City Spatial Structure, Women's Household Work, and National Urban Policy. *Signs* 5(3; Suppl.): S22-44.
- [29] Marston, S. (2004). "A Long Way From Home: Domesticating the Social Production of Scale." In *Scale and Geographic Inquiry: Nature, Society, and Method*, edited by E. Sheppard and R. McMaster, 170-91. London: Blackwell.
- [30] Turner, J. (1976). *Housing By People*. London: Marion Boyars.
- [31] Budiarti, Ratna, and Moh Nurhadi. (2017). Gender Assessment in Urban Transportation Case Study: Semarang City, Indonesia. *Indonesian Journal of Planning and Development* 2(1): 39-50.
- [32] Song, Lily, Mariel Kirschen, and John Taylor. (2019). "Women on wheels: Gender and cycling in Solo, Indonesia." *Singapore Journal of Tropical Geography* 40(1): 140-157.
- [33] Asteria, Donna; Jap, Janice J. K.; and Utari, Dyah. (2020). A Gender-Responsive Approach: Social Innovation for the Sustainable Smart City in Indonesia and Beyond. *Journal of International*

- Women's Studies*, 21(6), 193-207.
- [34] Mozar, R., & Sijbesma, C. (2010). Gender-and poor-inclusive community-managed sanitation and hygiene in urban Indonesia. *Water Practice and Technology*, 5(4).
- [35] Loroño-Leturiondo, M., & Illingworth, S. (2022). Gender and placemaking: talking to women about clean air and sustainable urban environments in changing cities. *Journal of Place Management and Development*, (ahead-of-print).
- [36] Momsen, J. H., & Townsed, J. G. (1987). *Geography of gender in the Third World*. Hutchinson.
- [37] Momsen, J. (2008). *Women and development in the third world*. Routledge.
- [38] Soja, E. (2010). *Seeking spatial justice*. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v21n2/v21n2a13.pdf>
- [39] Bunnell, T. (2019). Inclusiveness in Urban Theory and Urban Centered International Development Policy. *J. Reg. City Plan*, 30, 89-101.
- [40] Putra, B. D., Horne, R., & Hurley, J. (2019). Place, space and identity through greening in Kampung Kota. *J. Reg. City Plan*, 30, 211-223.
- [41] Djonoputro, B. (2011). *Welcome to Jakarta, diplomatic capital - Sat, December 10 2011 - The Jakarta Post*. The Jakarta Post. <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/10/welcome-jakarta-diplomatic-capital.html>
- [42] Bryman, A. (2015). *Social research methods*.
- [43] Yin, Robert K. (2012). *Study Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [44] Yulindrasari, H. (2020). Penelitian Gender dalam Pendidikan. In T. aryanti, V. Adriany, & D. Sukyadi, *Penelitian Kualitatif; Konsep Dasar dan Isu Metodologis*. Bandung: UPI Press.
- [45] Sutiyo, Sutiyo (2014). *Roles of Tonarigumi to Promote Participatory Development in Indonesia: Case of Three Villages in Purbalingga District, Central Java Province*. In: Tokyo International Conference on Social Science (TICSS), 17-19 December 2014, Tokyo, Japan.
- [46] Etzioni, A. (1994). *Spirit of Community*. New York: Simon & Schuster.
- [47] Delanty, G.,. (2003). *Community*.
- [48] Cohen, A. (2013). *Symbolic construction of community*.
- [49] Mulligan, M. (2015). On ambivalence and hope in the restless search for community: How to work with the idea of community in the global age. *Sociology*.
- [50] Paton, J. & Emery, M. (1996). Community planning in the Torres Strait. *The Journal for Quality and Participation*.
- [51] Lane, M. & Corbett, T. (2005). The tyranny of localism: indigenous participation in community-based environmental management. *Journal of Environmental Policy and Planning*.
- [52] Moran, M. (2010). The intercultural practice of local governance in an Aboriginal settlement in Australia. *Human Organization*.
- [53] Castells, M. (2011). *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture*.
- [54] Sassen, S. (2011). *Cities in a world economy*.
- [55] Everingham, C. (2001). Reconstituting Community : Social Justice, Social Order and The Politics of Community. *Australian Journal of Social Issues*.
- [56] Turner, Jeff. (2013). "Urban mass transit and social sustainability in Jakarta, Indonesia." Global Report on Human Settlements. Available from <http://www.unhabitat.org/grhs/2013>
- [57] Quijano, A. (2000). Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America. *International Sociology*.
- [58] Quijano, A. (2007). Coloniality and Modernity/Rationality. *Cultural Studies*.
- [59] Mignolo, W. (2011). *The Darker Side of Western Modernity : Global Futures, Decolonial Options*. London: Duke University Press.
- [60] Etzioni, A. (1996). *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*, New York: Basic Books.
- [61] Appleyard, D., 1982. three kinds of urban design practice appleyard - Google Scholar. In Ann Ferebee, ed. *Education for Urban Design* . New York: Institute for Urban Design.